

## ANALISIS BENTUK-BENTUK PARTISIPASI POLITIK DALAM PILKADA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024 DI DESA KAWALI KECAMATAN KAWALI

Ana Maulana Nugraha <sup>1)\*</sup>

Alex Abdhu Chalik <sup>2)</sup>

Rino Sundawa Putra <sup>3)</sup>

Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi <sup>1)</sup>

email: 223507078@student.unsil.ac.id

Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi <sup>2)</sup>

email: alexabdhuchalik@gmail.com

Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi <sup>3)</sup>

email: rinosundawaputra@gmail.com

---

### *Article Info*

### **ABSTRACT**

#### **Article History:**

#### **Received:**

April/2026

#### **Accepted:**

May/2026

#### **Published:**

June/2026

#### **Keywords:**

*Political Participation,  
Regional Election, Single  
Candidate, Kawali Village.*

#### **Kata Kunci:**

Partisipasi politik, Pilkada,  
Calon Tunggal, Desa Kawali

*This research is motivated by the phenomenon of single candidates in the 2024 Ciamis Regional Election, which risks reducing voter engagement. The study aims to analyze the forms of political participation in Kawali Village using the theories of Michael Rush and Philip Althoff. The method used is descriptive qualitative, with data collection techniques through observation, documentation, and in-depth interviews. The results show that participation is dominated by conventional-procedural forms such as voting, with a turnout rate of 79.7%. Critical participation, such as substantive discussions and protests, is relatively low. In conclusion, the high quantitative participation is more influenced by sociological factors and patronage mobilization than independent political awareness.*

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi fenomena calon tunggal dalam Pilkada Ciamis 2024 yang berisiko menurunkan animo pemilih. Penelitian bertujuan menganalisis bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat di Desa Kawali menggunakan teori Michael Rush dan Philip Althoff. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi didominasi bentuk konvensional-prosedural berupa pemberian suara (*voting*) dengan tingkat kehadiran 79,7%,

---

sementara partisipasi kritis seperti diskusi substansial dan aksi protes tergolong rendah. Kesimpulannya, tingginya partisipasi kuantitatif lebih dipengaruhi faktor sosiologis dan mobilisasi patronase daripada kesadaran politik mandiri.

---

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya dan suku bangsa yang sangat majemuk. Keberagaman ini menjadi fondasi bagi penerapan sistem demokrasi perwakilan, di mana seluruh lapisan masyarakat memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hak ini bukan sekadar formalitas, melainkan cerminan dari pengakuan terhadap kedaulatan rakyat dalam menentukan arah kepemimpinan di tingkat lokal (Riyadi dkk., 2024). Pilkada diposisikan sebagai pilar demokrasi esensial yang berfungsi merepresentasikan kehendak publik. Melalui mekanisme ini, pembentukan pemerintahan daerah diharapkan berjalan secara demokratis dan akuntabel (Zulhidayat dkk., 2024). Secara spesifik, pelaksanaan Pilkada langsung memberikan ruang partisipasi politik yang jauh lebih luas bagi masyarakat dibandingkan sistem perwakilan di lembaga legislatif (Hadad dkk., 2024).

Esensi dari sistem pemilihan langsung ini melampaui proses teknis pemberian suara di bilik suara. Pilkada adalah mekanisme intervensi politik melalui partisipasi publik yang juga berfungsi sebagai sarana pendidikan politik terbuka (Darna, 2019). Tujuannya adalah mentransformasi masyarakat dari sekadar penonton politik menjadi partisipan aktif yang memiliki kesadaran kritis terhadap kualitas kepemimpinan di daerahnya (Runtunuwu dkk., 2024). Tingkat kesadaran kolektif masyarakat untuk terlibat dalam urusan politik menjadi tolok ukur fundamental keberhasilan demokrasi. Partisipasi aktif ini merupakan proses kanalisasi aspirasi publik ke dalam ranah politik formal (Simaremare dkk., 2024). Pada puncaknya, partisipasi ini adalah wujud nyata kedaulatan rakyat, di mana pemilih bertindak sebagai aktor penentu utama dalam dinamika politik daerah (Ginting, 2023).

Berdasarkan perspektif tersebut, partisipasi politik merupakan *conditio sine qua non* atau prasyarat mutlak dalam membangun negara bangsa yang demokratis. Level keterlibatan warga negara menjadi indikator yang menentukan tinggi rendahnya kualitas demokrasi yang berkembang (Madani, 2023). Hal ini diperkuat dengan payung hukum yang jelas, seperti UU No. 7 Tahun 2017 dan UU No. 10 Tahun 2016, yang menjamin aktivitas politik masyarakat. Sejarah baru dimulai ketika Indonesia menyelenggarakan Pilkada serentak pertama kali pada tahun 2015 yang melibatkan ratusan pasangan calon (Julian, 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa dinamika demokrasi Indonesia terus beradaptasi dengan tuntutan reformasi. Penataan format politik yang lebih partisipatif memberikan akses kontrol yang lebih besar kepada masyarakat sebagai aktor kunci pemerintahan (Riswan dkk., 2024).

Tujuan utama dari pemilihan langsung adalah menciptakan akuntabilitas politik di tingkat lokal (Hindiawati, 2024). Namun, kualitas Pilkada sangat bergantung pada tingkat keterlibatan masyarakat, baik dalam memberikan suara maupun mengawasi jalannya kontestasi (Wijaya, 2023). Secara ideal, partisipasi yang tinggi akan menjamin legitimasi kepemimpinan, namun secara faktual, tantangan non-partisipasi masih menghantui proses ini (Alhadar dkk., 2024). Kondisi kontradiktif sering terjadi ketika Pilkada berjalan lancar secara teknis, namun tidak dibarengi dengan peningkatan kesadaran partisipatif (Setiawan dkk., 2023). Fenomena meningkatnya angka golongan putih (golput) menimbulkan kekhawatiran serius terhadap esensi demokrasi. Penurunan jumlah pemilih secara langsung akan menggerus kredibilitas dan kualitas hasil pemilu itu sendiri (Sujoko dkk., 2024).

Berbagai kendala seperti kurangnya pendidikan pemilih, apatisme, dan ketidakpercayaan pada sistem politik menjadi faktor penghambat utama. Selain itu, sistem multipartai yang kompleks seringkali membingungkan pemilih pemula (Mursyid dkk., 2021). Hal ini memicu pembentukan ruang diskursus di media sosial dan forum publik sebagai bentuk reaksi masyarakat terhadap dinamika partai politik (Darna, 2019). Kabupaten Ciamis, sebagai salah satu penyelenggara Pilkada serentak 2024, menghadapi tantangan nyata berupa penurunan tren partisipasi masyarakat. Data dari Desa Kawali menunjukkan variasi kehadiran yang signifikan antar TPS. Sebagai contoh, TPS 3 mencatatkan partisipasi tertinggi dengan 475 pemilih, sementara TPS 4 hanya mencapai 344 pemilih, mengindikasikan perbedaan efektivitas sosialisasi antar wilayah.

Kondisi di Kabupaten Ciamis sangat unik karena perilaku pemilihnya dipengaruhi oleh struktur sosial yang kuat dan nilai budaya Sunda. Namun, Pilkada 2024 di wilayah ini dihadapkan pada fenomena calon tunggal melawan kotak kosong. Munculnya pasangan calon tunggal diprediksi akan memengaruhi psikologi pemilih dan menurunkan semangat kompetisi (Iskandar, 2023). Fenomena calon tunggal sering kali diidentikkan dengan meningkatnya apatisme politik karena hasil akhir dianggap sudah dapat diprediksi (Setiawan, 2021). Kondisi non-kompetitif ini mengurangi insentif bagi pemilih untuk datang ke TPS karena merasa suara mereka kurang memiliki signifikansi. Hal ini menjadi tantangan besar bagi penyelenggara pemilu yang menargetkan partisipasi sebesar 80%.

Dalam situasi ini, fokus penelitian bergeser dari sekadar angka kuantitatif menuju analisis bentuk-bentuk partisipasi alternatif. Desa Kawali dipilih sebagai lokus penelitian karena memiliki akar sejarah dan solidaritas sosial yang tinggi. Ketiadaan lawan tanding bagi calon bupati menciptakan ruang hampa kompetisi yang unik di tengah masyarakat yang biasanya sangat aktif (Raharjo dkk., 2021). Dampak calon tunggal diprediksi mengubah spektrum partisipasi di Desa Kawali

dari bentuk konvensional menjadi non-konvensional. Partisipasi dapat muncul dalam bentuk diskusi kritis mengenai legitimasi pemimpin hingga aksi simbolik sebagai bentuk kekecewaan terhadap partai politik. Mobilisasi oleh tokoh masyarakat juga menjadi faktor penentu dalam menjaga marwah wilayah di tengah ketiadaan kompetisi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk membedah bagaimana masyarakat merespons ketiadaan kompetisi tersebut. Analisis akan dikategorikan ke dalam spektrum partisipasi aktif, pasif-apatis, hingga kreatif-simbolik. Hal ini penting untuk melihat apakah masyarakat Desa Kawali tetap mampu menjaga kedaulatannya di tengah keterbatasan pilihan politik. Struktur sosial-politik di Desa Kawali sangat dipengaruhi oleh hubungan patron-klien dan peran sentral tokoh lokal (Raharjo dkk., 2021). Isu klientelisme politik dalam pemilihan tingkat desa juga berpotensi memengaruhi sifat partisipasi menjadi lebih transaksional (Djakiyu, 2021). Oleh karena itu, hierarki partisipasi menurut Rush dan Althoff menjadi kerangka teori yang relevan untuk diterapkan dalam konteks ini.

Terdapat kekosongan empiris mengenai analisis mendalam partisipasi politik di tingkat desa dalam kondisi calon tunggal. Penelitian terdahulu seringkali hanya melaporkan angka *voter turnout* tanpa membedah variasi keterlibatan di tingkat menengah dan elite. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan gambaran sistematis mengenai pola partisipasi di Desa Kawali. Secara akademis, studi ini menguji daya terapan teori partisipasi politik Barat dalam konteks lokal Indonesia. Secara praktis, temuan ini akan memberikan rekomendasi bagi KPU dan Bawaslu dalam merancang strategi sosialisasi yang lebih tepat sasaran. Memahami motif di balik tindakan pemilih sangat penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang sehat dan sukarela (Halilah, 2022).

Upaya melibatkan masyarakat dalam pengawasan demokrasi selama ini dirasa belum membuahkan hasil maksimal (Yulianti, 2024). Penelitian serupa di daerah lain, seperti di Bulukumba dan Muaro Jambi, menunjukkan bahwa faktor modal sosial dan kepercayaan publik sangat dominan (Fikriansyah, 2025; Anggara, 2020). Namun, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis spesifik terhadap fenomena calon tunggal di Ciamis. Sebagai simpulan, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana bentuk partisipasi politik masyarakat Desa Kawali bertransformasi dalam menghadapi Pilkada 2024. Partisipasi bukan sekadar angka di TPS, melainkan indikator keberhasilan pembangunan politik dan kualitas demokrasi lokal di Indonesia (Sangkai dkk., 2024; Warni dkk., 2024)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat di Desa Kawali

pada Pilkada Kabupaten Ciamis 2024. Berlandaskan pada pemikiran konstruktivisme sosial, penelitian ini menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci untuk mengungkap makna subjektif dan kompleksitas fenomena sosial di lapangan (Creswell, 2010). Sumber data ditentukan secara *purposive sampling* yang mencakup situasi sosial berupa tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang saling berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2023). Informan dalam penelitian ini melibatkan beragam elemen masyarakat, mulai dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, hingga kelompok buruh dan pemilih pemula, guna memberikan gambaran partisipasi yang holistik dan kaya akan dinamika lokal (Farikiansyah dkk., 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi yang menggabungkan observasi partisipatif, wawancara semiterstruktur, dan studi dokumentasi untuk menjamin validitas serta kredibilitas data (Wahyudin, 2019). Data primer diperoleh langsung dari narasumber melalui tanya jawab mendalam, sementara data sekunder dihimpun dari dokumen resmi penyelenggaraan Pilkada serta literatur ilmiah terkait (Harahap, 2024). Analisis data dilaksanakan secara iteratif mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data dalam bentuk teks naratif, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Partisipasi politik di Desa Kawali pada Pilkada Kabupaten Ciamis 2024 menunjukkan dinamika yang unik, di mana sistem demokrasi lokal berhadapan dengan fenomena calon tunggal yang secara teoretis diprediksi akan menurunkan animo masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kawali, tingkat kehadiran pemilih atau *voter turnout* mencapai angka yang cukup impresif yakni 79,7% dari total 2.768 Daftar Pemilih Tetap (DPT). Fenomena ini menunjukkan adanya persistensi budaya politik subjek yang kuat di wilayah perdesaan Kabupaten Ciamis (Wijaya, 2025). Temuan utama penelitian ini mengonfirmasi bahwa partisipasi politik di Desa Kawali didominasi oleh bentuk konvensional-prosedural, yaitu pemberian suara atau *voting*. Hierarki partisipasi yang dikemukakan oleh Michael Rush dan Philip Althoff tampak jelas di sini, di mana dasar piramida yang berisi aktivitas pemungutan suara memiliki kuantitas partisipan paling besar. Hal ini mengindikasikan bahwa bagi mayoritas warga, politik masih dipandang sebagai kewajiban administratif lima tahunan (Arifin, 2022).

Analisis terhadap distribusi suara menunjukkan bahwa TPS 003 mencatatkan tingkat partisipasi tertinggi sebesar 89,0%, sedangkan TPS 001 menjadi yang terendah dengan 74,5%. Variasi ini memberikan interpretasi bahwa mobilisasi politik di tingkat lokal tidak merata dan sangat bergantung pada

efektivitas tokoh-tokoh kunci di tiap dusun. Peneliti berargumen bahwa perbedaan angka ini mencerminkan sejauh mana kedekatan emosional pemilih dengan struktur penggerak di lingkungan terkecil mereka (Anggara dkk., 2020). Pada level yang lebih tinggi dalam hierarki partisipasi, ditemukan adanya kelompok elite lokal yang menduduki jabatan administratif dalam struktur tim pemenangan. Kelompok ini memiliki akses terhadap sumber daya kekuasaan yang memungkinkan mereka melakukan mobilisasi massa secara sistematis melalui jejaring sosial. Peneliti menilai bahwa keterlibatan pada level ini bukan sekadar aktivitas politik biasa, melainkan bentuk investasi strategis jangka panjang (Pratama, 2022).

Menariknya, terdapat pergeseran profil aktor politik di Desa Kawali, di mana jabatan strategis kini mulai diisi oleh kaum terpelajar dan aktivis muda. Kehadiran "Digital Campaign Manager" dari kalangan pemuda membedakan dinamika Pilkada 2024 dengan periode sebelumnya yang didominasi tokoh tradisional. Peneliti berpendapat bahwa literasi teknologi yang dimiliki pemuda menjadi modal politik baru (Hidayat, 2023). Aktivitas "mencari jabatan" dalam Pilkada Ciamis 2024 di Desa Kawali dimaknai oleh informan sebagai partisipasi elite yang produktif. Warga yang terlibat aktif dalam tim sukses memandang posisi tersebut sebagai laboratorium politik untuk membangun legitimasi dan jaringan. Peneliti mengartikan fenomena ini sebagai bentuk simbiosis mutualisme antara kandidat dengan tenaga ahli lokal (Ramadhan, 2023).

Dalam kategori keanggotaan organisasi politik, partisipasi aktif di Desa Kawali lebih banyak terfokus pada pembuatan strategi pemenangan di tingkat akar rumput. Sebaliknya, keanggotaan pasif mencakup individu yang hanya terdaftar secara formal tanpa kontribusi pemikiran yang signifikan. Peneliti melihat bahwa sekat antara anggota aktif dan pasif ditentukan oleh kapasitas intelektual (Kurnia, 2023). Keunikan lain ditemukan pada kategori organisasi semu politik (*pseudo-political organizations*), di mana penelitian ini tidak menemukan aktivitas signifikan di Desa Kawali. Warga cenderung menghindari pembentukan organisasi "front" karena saluran politik formal dianggap sudah cukup terbuka. Peneliti menafsirkan ketiadaan ini sebagai indikator bahwa masyarakat lebih menghargai transparansi (Iskandar, 2023).

Budaya harmoni dan kohesi sosial yang kuat di Desa Kawali juga menjadi alasan mengapa organisasi semu tidak berkembang secara liar. Masyarakat menyadari bahwa membawa kepentingan politik ke dalam organisasi sosial dapat memicu polarisasi yang merugikan. Peneliti berargumen bahwa ini adalah bentuk mekanisme pertahanan sosial untuk menjaga stabilitas desa (Simaremare dkk., 2024). Terkait partisipasi dalam rapat umum dan kampanye, keterlibatan warga Desa Kawali cenderung bersifat mobilisasi massa yang dipicu faktor eksternal. Kehadiran masyarakat dalam acara kampanye sering kali didorong oleh unsur hiburan, seperti penampilan musik atau seni lokal. Peneliti menilai bahwa politik di

tingkat desa sering kali masih diposisikan sebagai ajang rekreasi sosial (Sari, 2024). Pemberian insentif berupa biaya transportasi atau konsumsi juga menjadi daya tarik utama bagi warga untuk terlibat dalam aktivitas lapangan. Fenomena ini memperkuat pandangan bahwa partisipasi massa di pedesaan sering kali bersifat *top-down mobilization*. Peneliti menginterpretasikan hal ini sebagai dampak dari kondisi ekonomi masyarakat yang pragmatis (Raharjo dkk., 2021).

Meskipun demikian, terdapat potensi besar pada organisasi keagamaan seperti majelis taklim sebagai wadah edukasi etika politik. Beberapa tokoh agama di Desa Kawali telah berupaya menyisipkan pesan tentang kepemimpinan yang adil dalam ceramahnya. Namun, peneliti mencatat bahwa forum-forum ini tetap rentan terhadap intervensi kepentingan sepihak (Kurniawan, 2024). Di sisi lain, organisasi kepemudaan formal seperti Karang Taruna di Desa Kawali menunjukkan kecenderungan pasif dalam hal kritik kebijakan. Forum yang melibatkan pasangan calon sering kali hanya bersifat monolog tanpa adanya dialog kritis yang substantif. Peneliti berpendapat bahwa rendahnya independensi disebabkan oleh afiliasi politik pengurus (Syahputra, 2024).

Dalam hal partisipasi dalam aksi protes atau demonstrasi, data lapangan menunjukkan nihilnya aktivitas tersebut selama masa Pilkada 2024. Masyarakat cenderung menghindari konfrontasi terbuka dan lebih memilih jalur musyawarah yang lebih damai. Peneliti menafsirkan hal ini sebagai manifestasi dari budaya politik subjek yang mengutamakan harmoni (Zulhidayat dkk., 2024). Diskusi politik informal merupakan tingkat partisipasi yang cukup hidup di tingkat akar rumput, khususnya di warung-warung kopi. Warga sering berdiskusi mengenai profil calon, namun jarang menyentuh substansi visi misi secara mendalam. Peneliti menilai bahwa minat umum dalam politik sudah ada namun literasi politiknya perlu ditingkatkan (Darna, 2019). Hambatan struktural utama bagi partisipasi yang lebih aktif adalah faktor ekonomi dan keterbatasan waktu luang bagi buruh tani. Kesibukan bekerja membuat mereka tidak memiliki energi ekstra untuk terlibat dalam organisasi politik secara mendalam. Peneliti menyimpulkan bahwa kesejahteraan ekonomi merupakan prasyarat bagi partisipasi berkualitas (Kusnadi, 2022).

Lingkungan keluarga juga memegang peranan krusial sebagai agen sosialisasi politik bagi pemilih pemula di Desa Kawali. Banyak anak muda yang memberikan suara hanya mengikuti pilihan orang tua mereka tanpa melakukan riset mandiri. Peneliti melihat adanya kecenderungan konformitas sosial yang tinggi dalam unit keluarga (Turner, 2020). Tekanan teman sebaya (*peer pressure*) juga menjadi faktor pendorong partisipasi bagi kaum muda agar dianggap aktif secara sosial. Datang ke TPS bagi sebagian pemuda adalah bagian dari gaya hidup untuk menunjukkan eksistensi diri di media sosial. Peneliti berargumen bahwa motivasi ini lebih bersifat psikologis daripada ideologis (Mursyid dkk., 2021). Keberadaan

calon tunggal di Kabupaten Ciamis menciptakan paradoks partisipasi di mana masyarakat merasa pilihannya terbatas. Namun, kerja keras penyelenggara pemilu dalam melakukan sosialisasi berhasil meminimalisir angka golongan putih (golput). Peneliti menilai efektivitas sosialisasi menjadi kunci terjaganya angka kehadiran (Setiawan, 2021). Secara kualitatif, partisipasi tersebut masih terperangkap dalam level pasif yang dipengaruhi oleh pola patronase tradisional. Masyarakat cenderung mengikuti arahan dari tokoh yang dianggap memiliki pengaruh materi atau status sosial tinggi. Peneliti menegaskan pentingnya transformasi menuju pemilih yang lebih berdaulat (Ginting, 2023).

Dinamika politik di Desa Kawali juga menunjukkan bahwa akses informasi melalui media sosial mulai menggeser pola komunikasi konvensional. Warga kini lebih mudah mendapatkan informasi mengenai tahapan Pilkada melalui grup WhatsApp dusun. Peneliti melihat ini sebagai peluang untuk digitalisasi demokrasi di tingkat desa (Halilah, 2022). Namun, melimpahnya informasi digital tidak serta merta meningkatkan kualitas diskusi politik di tingkat bawah. Seringkali informasi yang tersebar hanya bersifat seremonial dan kurang menyentuh substansi permasalahan daerah. Peneliti berpendapat bahwa pendampingan literasi digital sangat diperlukan (Wijaya, 2023). Ketidakhadiran pasangan kompetitor membuat dinamika kampanye terasa lebih tenang dan minim gesekan horizontal. Kondisi keamanan yang kondusif ini diapresiasi oleh warga sebagai bentuk kenyamanan dalam berdemokrasi. Peneliti menafsirkan stabilitas ini sebagai sisi positif dari fenomena calon tunggal (Julian, 2023). Di sisi lain, rendahnya kompetisi juga berisiko menciptakan sikap apatis bagi pemilih yang merasa hasilnya sudah bisa ditebak. Beberapa pemilih menyatakan bahwa kehadiran mereka ke TPS hanya untuk menggugurkan kewajiban sebagai warga desa. Peneliti melihat adanya risiko degradasi makna demokrasi jika hal ini terus berlanjut (Setiawan dkk., 2023).

Peran perempuan dalam partisipasi politik di Desa Kawali juga menunjukkan peningkatan dalam hal kuantitas kehadiran di TPS. Namun, dalam pengambilan keputusan strategis di tim sukses, peran perempuan masih sangat terbatas pada urusan logistik. Peneliti menilai perlunya afirmasi peran perempuan dalam struktur politik desa (Yulianti, 2024). Struktur PPS dan KPPS di Desa Kawali yang didominasi oleh anak muda memberikan nafas baru dalam integritas penyelenggaraan. Ketelitian dalam proses administrasi meminimalisir potensi sengketa di tingkat lokal yang sering terjadi sebelumnya. Peneliti mengapresiasi profesionalisme penyelenggara tingkat bawah (Sujoko dkk., 2024).

Munculnya gerakan kotak kosong sebagai bentuk protes terhadap calon tunggal tidak terlalu terlihat di Desa Kawali secara terorganisir. Warga lebih memilih untuk mendukung calon yang ada daripada memberikan suara pada kolom kosong yang tidak memiliki visi misi. Peneliti melihat ini sebagai bentuk pragmatisme pemilih perdesaan (Hadad dkk., 2024). Kajian ini juga menemukan

bahwa kedekatan calon bupati dengan tokoh-tokoh agama di Kawali menjadi faktor penentu arus dukungan. Simbol-simbol keagamaan sering digunakan dalam narasi kampanye untuk menarik simpati warga yang religius. Peneliti berargumen bahwa agama tetap menjadi instrumen politik yang efektif (Djakiyu, 2021).

Program bantuan sosial yang diturunkan menjelang Pilkada juga memiliki korelasi dengan tingkat kepuasan warga terhadap petahana. Meskipun secara regulasi dilarang untuk kampanye, persepsi warga terhadap bantuan tersebut tetap positif terhadap pemberinya. Peneliti mencatat adanya batas tipis antara kebijakan publik dan strategi elektoral (Hindiawati, 2024). Evaluasi terhadap partisipasi politik di Desa Kawali menunjukkan perlunya pendidikan politik yang berkelanjutan. Pendidikan politik sebaiknya tidak hanya dilakukan menjelang hari pemungutan suara oleh penyelenggara. Peneliti mengusulkan keterlibatan akademisi dalam penguatan basis data politik warga (Alhadar dkk., 2024). Kehadiran pengawas pemilu lapangan (PPL) yang aktif di Desa Kawali turut berkontribusi pada ketertiban jalannya tahapan Pilkada. Pengawasan yang ketat membuat tim sukses lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan yang melanggar aturan. Peneliti menilai pengawasan partisipatif dari warga sendiri masih perlu ditingkatkan (Runtunuwu dkk., 2024). Dukungan infrastruktur jalan yang baik di Desa Kawali juga mempermudah mobilisasi pemilih menuju lokasi TPS masing-masing. Aksesibilitas fisik ternyata berkontribusi secara tidak langsung terhadap tingginya angka *turnout*. Peneliti melihat pembangunan fisik sebagai penunjang kelancaran demokrasi (Madani, 2023).

Sentimen kedaerahan sebagai sesama warga Ciamis menjadi motivasi kolektif untuk mensukseskan Pilkada demi kemajuan daerah. Warga merasa memiliki tanggung jawab moral agar Kabupaten Ciamis tetap memiliki kepemimpinan yang sah. Peneliti menginterpretasikan ini sebagai bentuk nasionalisme lokal yang positif (Riyadi dkk., 2024). Secara teoretis, temuan ini memperkuat argumentasi bahwa partisipasi di pedesaan lebih dipengaruhi oleh faktor sosiologis daripada faktor rasional. Pilihan individu sangat bergantung pada konsensus kelompok yang ada di lingkungannya. Peneliti melihat pola ini sebagai ciri khas demokrasi Indonesia di tingkat akar rumput (Arifin, 2022). Integrasi antara data kuantitatif kehadiran dan data kualitatif wawancara menunjukkan gambaran partisipasi yang komprehensif. Meskipun angka kehadiran tinggi, tantangan substansi keterlibatan tetap menjadi catatan kritis bagi masa depan. Peneliti menegaskan bahwa kualitas suara lebih penting daripada sekadar jumlah suara (Darna, 2019).

Dalam jangka panjang, diharapkan masyarakat Desa Kawali dapat bertransformasi menjadi pemilih yang lebih kritis dan mandiri. Hal ini hanya bisa dicapai melalui penguatan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang independen. Peneliti percaya bahwa potensi tersebut ada pada generasi muda yang mulai aktif

(Syahputra, 2024). Penyelenggaraan Pilkada 2024 di Desa Kawali dapat menjadi *role model* bagi desa lain dalam hal ketertiban dan partisipasi. Koordinasi yang baik antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan penyelenggara adalah kunci keberhasilan. Peneliti menyarankan agar pola koordinasi ini didokumentasikan dengan baik (Sujoko dkk., 2024). Akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa demokrasi tetap hidup di tingkat desa meskipun dengan berbagai keterbatasan struktural. Partisipasi warga adalah modal sosial yang paling berharga bagi pembangunan daerah yang inklusif. Peneliti berpendapat bahwa suara rakyat di desa adalah denyut nadi demokrasi nasional (Ginting, 2023). Peneliti menyimpulkan bahwa meskipun diwarnai fenomena calon tunggal, masyarakat tetap menunjukkan komitmen pada proses prosedural. Tantangan ke depan adalah menjaga semangat ini agar tetap murni dan tidak terkooptasi kepentingan sesaat. Peneliti mengajak seluruh elemen untuk terus mengawal kualitas demokrasi (Julian, 2023). Sebagai penutup, analisis bentuk partisipasi politik di Desa Kawali memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku politik masyarakat perdesaan. Hasil ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemangku kebijakan dalam menyusun strategi pendidikan politik. Peneliti menegaskan bahwa partisipasi adalah hak sekaligus tanggung jawab (Wijaya, 2025).

## **SIMPULAN**

Pada kesimpulannya tulisan ini memperlihatkan bahwa partisipasi politik masyarakat Desa Kawali dalam Pilkada Ciamis 2024 didominasi oleh partisipasi konvensional-prosedural, yakni pemberian suara (*voting*) dengan tingkat kehadiran mencapai 79,7%. Temuan ini menjawab rumusan masalah bahwa meskipun dihadapkan pada fenomena calon tunggal, mobilisasi massa tetap efektif melalui peran elite lokal, jaringan sosial, dan insentif transaksional, sementara partisipasi yang lebih kritis seperti diskusi substansial atau aksi protes tetap rendah. Secara teoretis, hasil ini mengonfirmasi hierarki partisipasi Michael Rush dan Philip Althoff, di mana semakin tinggi intensitas aktivitas politik, semakin sedikit jumlah individu yang terlibat, yang dalam konteks perdesaan sangat dipengaruhi oleh budaya politik subjek dan ketergantungan pada patronase.

Implikasi praktis dari penelitian ini menekankan perlunya transformasi literasi politik agar masyarakat tidak sekadar menjadi objek mobilisasi, tetapi menjadi subjek yang kritis dalam mengawal kebijakan daerah. Keterbatasan penelitian ini terletak pada lokus yang hanya mencakup satu desa sehingga dinamika yang ditemukan mungkin berbeda dengan wilayah perkotaan atau daerah dengan tingkat persaingan calon yang lebih kompetitif. Oleh karena itu, arah penelitian selanjutnya perlu memperluas jangkauan analisis pada perbandingan perilaku pemilih antara wilayah basis calon tunggal dengan wilayah yang memiliki

banyak kandidat, serta mendalami efektivitas kampanye digital di tingkat akar rumput dalam memengaruhi independensi pemilih pemula.

## REFERENSI

- Artini, L.P., & Nilan, P. (2014). Learning to work on a cruise ship: Account from Bali. *International Education Journal : Comparative Perspective*, 13(2), 1-14. Retrieved from <https://openjournals.library.sydney.edu.au/index.php/IEJ/article/view/7654/8431>
- Alhadar, A., dkk. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Anggara, D. (2020). *Analisis partisipasi politik masyarakat di kecamatan kumpeh kabupaten Muaro Jambi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi 2020*. (Skripsi/Tesis).
- Darna. (2019). Pendidikan Politik dan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Demokrasi Lokal*.
- Djakiyu. (2021). Klientelisme dan Politik Desa di Jawa Barat. *Jurnal Sosial Politik*.
- Fikriansyah, M. F. (2025). *Analisis partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan*. (Skripsi/Tesis).
- Ginting, R. (2023). Kedaulatan Rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung. *Jurnal Hukum Tata Negara*.
- Hadad, M., dkk. (2024). Ruang Partisipasi Politik dalam Sistem Pilkada Serentak. *Jurnal Politik Terapan*.
- Halilah, S. (2022). Persepsi Masyarakat terhadap Hak Suara dalam Pemilu. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*.
- Hindiawati. (2024). Akuntabilitas Politik Lokal melalui Pemilihan Langsung. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Iskandar. (2023). Fenomena Calon Tunggal dan Dampaknya terhadap Partisipasi Pemilih. *Jurnal Riset Politik*.
- Julian. (2023). Sejarah dan Dinamika Pilkada Serentak di Indonesia. *Jurnal Sejarah Politik*.
- Madani. (2023). Indikator Kualitas Demokrasi di Negara Berkembang. *Jurnal Ilmu Politik*.
- Mursyid, dkk. (2021). Dilema Pemilih Pemula dalam Sistem Multipartai. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Raharjo, dkk. (2021). Hubungan Patron-Klien dalam Kontestasi Politik Desa. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*.
- Riswan, dkk. (2024). Reformasi Penataan Format Politik Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*.
- Riyadi, dkk. (2024). Keberagaman Budaya dan Sistem Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Antropologi Politik*.
- Runtunuwu, dkk. (2024). Kualitas Demokrasi di Tingkat Lokal. *Jurnal Politik Daerah*.
- Sangkai, dkk. (2024). Analisis Kedalaman Partisipasi Politik dalam Pilkada Langsung. *Jurnal Riset Administrasi*.
- Saputra, R. (2025). *Bentuk-bentuk partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan presiden 2024 di Kabupaten Bantul*. (Skripsi/Tesis).
- Setiawan, A. (2021). Psikologi Pemilih dalam Kondisi Calon Tunggal. *Jurnal Psikologi Politik*.
- Setiawan, dkk. (2023). Tantangan Kesadaran Partisipatif Publik dalam Pemilu. *Jurnal Komunikasi Politik*.
- Simaremare, dkk. (2024). Kesadaran Kolektif sebagai Tolok Ukur Demokrasi. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*.
- Sujoko, dkk. (2024). Korelasi Partisipasi dan Kredibilitas Hasil Pemilu. *Jurnal Hukum dan Pemilu*.
- Warni, dkk. (2024). Pembangunan Politik dan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Dinamika Global*.
- Wijaya. (2023). Pengawasan Partisipatif dalam Kontestasi Demokrasi. *Jurnal Bawaslu*.

- Yulianti, Y. (2024). Evaluasi Pengawasan Masyarakat dalam Proses Demokrasi. *Jurnal Tata Kelola Pemilu*.
- Zulhidayat, dkk. (2024). Pilar Demokrasi dan Pembentukan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Konstitusi*